

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Rangkang Education Dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang; Universitas Diponegoro.
- Delliyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty; Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Elwi Danil. 2012. *Korupsi; Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Cet.2. Ed.1. Jakarta; Rajawali Pers.
- Ermansyah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung; Mandar Maju.
- Henry Camble Black. 1990. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*. St. Paul Minn; West Publising Co.
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung; Alumnus.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta; Prenada Media Group.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta; Sinar Grafika.

- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar; Pustaka refleksi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Buku Saku KPK. Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta; KPK.
- Marpaung, L. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Bina Aksara.
- Rahmanuddin Tamalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta; Deepublish.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-14. Jakarta; Rajawali Press.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. 2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan dan (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung; Penerbit Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta; Deepublish.
- Wicaksana. Dio Ashar. dkk. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok; Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Didik Kurniawan. 2023. *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Faisal Pratama Afandi. 2020. *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Eddy Hiariej. 2019. *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 31 Nomor 1.

Farid Achmad. 2019. *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. Volume 7 Nomor 1.

Gede Putera Perbawa. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*. Arena Hukum. Volume 7 Nomor 3.

Johana Mamengko. 2012. *"Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi"*. Lex Crimen Volume 1 Nomor 1.

Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2023. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. The Prosecutor Law Review. Volume 1 Nomor 1.

Yuni Retnowati. 2014. *Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan*. Volume 18. Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor.B 1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016.